



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERY PURWANTO

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK : 734148

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.583.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/46 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 931.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m²/284 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.652.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 322.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

3. MOBIL, HONDA BRV DG3 1.5L PRE MS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 264.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 261.346.740

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.189.546.740

III. HUTANG Rp. 17.652.552

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.171.894.188

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.